

**PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT  
(WKR) DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI  
DESA KWALA SERAPUH KAB. LANGKAT**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FARADIBA TARIGAN**  
**NPM 1703090016**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2021**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **Faradiba Tarigan**  
NPM : 1703090016  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

PENGUJI II : **Sahran Sahputra S.Sos., M.Sos.**

PENGUJI III : **H. Mujahidin S.Sos., MSP.**

**PANITIA UJIAN**

Ketua,

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Sekretaris,

**Drs. ZULFAHMI M.IKOM**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Mahasiswa : **Faradiba Tarigan**  
NPM : 1703090016  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KWALA SERAPUH KAB.LANGKAT**

Medan, 15 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



**H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP**

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi



**H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP**

Dean,

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FARADIBA TARIGAN, NPM 1703090016, menyatakan dengan sesungguhnya :

Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.

Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan

Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



**Faradiba Tarigan**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT (WKR) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI  
DESA KWALA SERAPUH KAB. LANGKAT**

**FARADIBA TARIGAN**

**1703090016**

**ABSTRAK**

Praktik pengrusakan kawasan hutan mangrove di Pesisir Langkat masih rutin terjadi hingga hari ini satu diantaranya di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pemasalahan yang berawal dari pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi areal perkebunan sawit dan pertambahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengakibatkan kondisi krisis, karena berkurangnya pendapatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya masalah konflik, Walhi-Sumut Menjalankan Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Kwala Serapuh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Program Wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab.Langkat. penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang dimana berupa kata-kata,berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis kebenaran yang dijalankan program dilapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang masyarakat dan Direktur ED Walhi-Sumut serta 1 Deputi 2 Walhi-Sumut. Hasil penelitian ini dengan adanya program wilayah kelola rakyat dapat mengembalikan fungsi hutan mangrove sehingga masyarakat desa kwala serapuh dapat kembali meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Kwala Serapuh.

**Kata Kunci : Peran Program Wilayah Kelola Rakyat, Kesejahteraan Ekonomi**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriringan salam juga penulis panjat persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari jalan jahiliyah hingga sekarang pada jaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**Peran Pogram Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab.Langkat**”. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Untuk teristimewa kedua orangtua penulis Bapak Bahri Tarigan dan Ibu Sugiarti terimakasih untuk doa dan kasih sayang tulus yang tak ternilai harganya, serta telah bersusah payah membesarkan dan membiyai studi penulis. Teristimewa

keluarga saya Abang saya tersayang Jaka Subadra Tarigan terimakasih doa dan dukungannya dan semua keluarga serta saudara yang selalu mendukung dan perhatiannya kepada penulis dalam semua kegiatan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.SP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberikan motivasi, dan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
6. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.

8. Bapak Doni Latuparisa S.Sos selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi-Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada abang Rianda Purba S.sos, Abang Ari, dan Kak Fhiliya selaku Staff Walhi-Sumut yang turut membantu dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.
10. Kepada Kelompok Tani Nipah Desa Kwala Serapuh yang membantu penulis dalam penelitian.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat tersayang dan tercinta Mutia Riski Aulia, Selvia Dinanti Solin, Reni Fitriyanti Solin, Rifdah Aprilia Sambo, dan Dewi Wulandari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman teristimewa Ramayani Hulu, Ramayana Hulu, Kiki, Tuti, kak Tiah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Wardah Hanum Harefa, Syafriadi, M Aqil Akbari, Kurnia Sandi, Andini, Syeira, Imah, Fika, dan seluruh teman-teman Kessos Stambuk-17 yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
14. Terimakasih kepada Kakak Dewita Wilindya Sari dan Kak Naya Andary yang telah memberikan suport dan motivasi kepada penulis.
15. Penulis juga berterimakasih kepada Bang Halim, Bang Fencen, Bang Maswan, Bang Fadli, Bang Albert, Bang Dedi Sinuhaji, Kak Tia, Bang Ibel

dan seluruh abang kakak di Markas Kopi Tao yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

16. Terimakasih kepada teman-teman UKM Basket Umsu telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjadi wadah dalam belajar bagi penulis.
18. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadikan amal saleh dan ibalas oleh Allah SWT.

***Wassalamu'aalaikum Warahmatulahi Wabarakatuh***

Medan, Oktober 2021

Faradiba Tarigan

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Peran .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Program Wilayah Kelola Rakyat .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.1. Pengertian Program Wilayah Kelola Rakyat .....</b>	<b>13</b>

2.2.2. Tujuan Program Wilayah Kelola Rakyat .....	13
2.2.3 Program WKR Sebagai Pendekatan Advokasi .....	14
2.2.4 Sistem Kerja Program Wilayah Kelola Rakyat .....	16
2.2.5 Struktur Kerja Program Wilayah Kelola Rakyat .....	17
2.2.6 Rencana Kegiatan Peningkatan Program Wilayah Kelola Rakyat di Desa Kwala Serapuh .....	18
2.3. Kesejahteraan .....	21
2.4. Kesejahteraan Ekonomi .....	22
2.5 Desa .....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Kerangka Konsep .....	29
3.3 Definisi Konsep .....	30
3.4 Kategorisasi.....	31
3.5 Informan/Narasumber .....	32
3.6 Teknik Penyajian Data .....	33
3.7 Teknik Analisa Data.....	34

<b>3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.9.1 Gambaran Umum Desa Kwala Serapuh .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3.2 Kerangka Konsep .....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 6.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 1.1 : Dokumentasi Wawancara dengan Direktur-Walhi Sumut dan Masyarakat di Desa Kwala Serapuh.....</b>	<b>64</b>
<b>Gambar 1.2 Dokumentasi Observasi Lapangan di Desa Kwala Serapuh</b>	<b>65</b>

**DATAR TABEL**

**Tabel 3.4 Kategorisasi ..... 31**

**Tabel 3.5 Narasumber Penelitian ..... 32**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Agenda pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan strategi pembangunannya yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi melalui skema perluasan investasi dan industri-industri ekstraksi sumber daya alam dan bahan mentah untuk pemenuhan kebutuhan pasar global tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan komunitas. Dampak dari konsep pembangunan tersebut telah nyata melalui peningkatan jumlah konflik yang terjadi serta percepatan penurunan daya dukung lingkungan hidup.

Pemberian izin eskploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber agraria oleh pemerintah kepada korporasi mengakibatkan kesenjangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber-sumber agraria tersebut. Kesenjangan ini telah mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, bahkan dengan negara. Oleh karena itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hadir sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan.

Hutan mangrove adalah komunitas tumbuh – tumbuhan yang didominasi oleh jenis *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Avicennia* yang kehidupannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaan Mangrove sebagai bagian dari ekosistem Pesisir memiliki fungsi ganda dalam kehidupan masyarakat, fungsi sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Secara ekonomis, mangrove memiliki nilai ekonomi baik dari buah dan berbagai biota dalam ekosistem mangrove.

Dalam Jurnal *Ecosystem Services*, Brander menuliskan bahwa rata-rata ekosistem mangrove mampu menghasilkan \$ 4.185/Ha/tahun. Ditinjau dari sisi lingkungan hidup, mangrove memiliki peran sebagai benteng alamiah daratan dari terjangan abrasi pantai serta memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Penelitian CIFOR menyebutkan bahwa hutan mangrove Indonesia menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektar dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi. Indonesia yang memiliki sekitar tiga juta hektare hutan mangrove atau mewakili 20 persen lebih bakau dunia. Namun ironisnya, ekosistem mangrove justru menjadi objek yang dialihfungsikan menjadi areal monokultur dan investasi lainnya yang merusak ekosistem mangrove.

Praktik pengerusakan Kawasan hutan Mangrove di Pesisir Langkat masih rutin terjadi hingga hari ini. Satu diantara banyak masalah tersebut dialami oleh Kelompok Tani Nipah, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Upaya rehabilitasi Mangrove oleh kelompok Tani Nipah kerap mendapat hadangan dan tantangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menanam kelapa sawit di kawasan hutan. Pengerusakan tanaman mangrove terjadi dengan cara pembakaran yang diduga dilakukan oleh oknum perkebunan sawit yang juga beraktivitas di hutan swakelola Kelompok Tani Nipah.

Pembukaan perkebunan sawit di pesisir Langkat mulai dilakukan oleh para pengusaha sejak tahun 1990-an awal. Di ketiga desa tersebut, rata-rata pemilik perkebunan dan pertambakan adalah pengusaha-pengusaha yang justru bukan masyarakat setempat. Mereka rata-rata memiliki 50-200 Ha sawit setiap orangnya dan 5- 20 hektar untuk setiap tambak. Parahnya lagi, perkebunan Sawit yang merusak kawasan pesisir tersebut justru tidak memiliki izin hak guna usaha atau izin lainnya. Bahkan, dengan luasan-luasan tersebut, tidak sedikit perkebunan ini sendiri pengelolaannya tanpa sebuah perusahaan badan hukum seperti PT atau lain sebagainya. Ada yang sama sekali tidak berbadan hukum, kepemilikan perorangan yang cukup luas, dan ada juga dikelola oleh koperasi serba usaha (KSU). Bahkan, berdasarkan SK 579 tentang penunjukan kawasan hutan, perkebunan dan tambak tersebut sebagian besar berada di kawasan yang berstatus hutan.

Di Desa Kwala Serapuh, Bubun, dan Gebang kabupaten Langkat, perambahan dan alih fungsi kawasan hutan mangrove mulai terjadi pada akhir tahun 1990-an sampai saat ini. Pengusaha mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan dilengkapi SK Desa dan Camat. Keseluruhan luas sawit dan areal tambak di ketiga desa yang saling berbatasan ini mencapai lebih kurang 3000-an hektare.

WALHI-Sumatera Utara merupakan jaringan pembela lingkungan hidup yang pluralistik dan independen yang aktif melakukan studi kebijakan, mensinergikan kekuatan antar organisasi non pemerintah dalam advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat (advokasi hutan, tambang, air, pesisir, dan laut, reformasi hukum dan pengelolaan sumber daya alam, energy, pencemaran pengelolaan bencana, dan globalisasi). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengelolaan informasi, memfasilitasi dialog antar masyarakat dengan berbagai kelompok kepentingan, menggalang dan memobilisasikan sumberdaya publik serta mengembangkan kemampuan sumber daya informasi.

Program Wilayah Kelola rakyat atau WKR merupakan salah satu agenda penting Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera utara, yang telah ditetapkan dalam mandat PNLH XII WALHI di Palembang. Wilayah kelola rakyat adalah ruang hidup masyarakat dengan system kelolanya yang integratif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan

lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan

Desa Kwala Serapuh merupakan salah satu wilayah yang berhasil mendapatkan izin Hkm-PS dilokasi wilayah perhutanan sosial oleh Walhi-Sumut bersama kelompok tani nipah. Adapun program dalam Wilayah Kelola Rakyat (WKR) ini terdapat pada perhutanan sosial, yang merupakan salah satu kebijakan yang mendorong adanya akses legal pengelolaan hutan kepada rakyat.

Desa Kwala Serapuh merupakan kawasan hutan mangrove, yang mana masyarakatnya sangat menggantungkan kehidupannya pada ekosistem mangrove. Hutan Mangrove menjadi sumber pendapatan masyarakat desa kwala serapuh. Salah satu sumber penghasilan yang didapat masyarakat desa kwala serapuh yakni dari hasil menangkap kepiting mangrove dan berbagai hasil tangkapan yang hidup di mangrove.

Selain itu penghasilan yang didapat masyarakat Desa Kwala Serapuh juga berasal dari pengelolaan hutan bukan kayu (hbk) yang berasal dari daun pucuk nipah, sebagai komoditas hutan yang dikelola Kelompok Tani Nipah yang meningkatkan pendapatan seluruh pengurus dan anggota kelompok tani nipah. Dengan terjaganya ekosistem mangrove yang baik dan benar, maka menjaga sumber-sumber penghasilan masyarakat.

Kesejahteraan warga negara yang dimimpikan dapat terwujud jika pengelolaannya mendasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek utamanya. Penempatan masyarakat pada posisi tersebut tidak lepas dari perjalanan historis ragam komunitas di nusantara yang memiliki nilai dan kearifan hasil dari interaksi dan interelasinya dengan alam tempatan.

Pengrusakan hutan mangrove di pesisir langkat kerap terjadi hingga hari ini, satu diantaranya di Desa Kwala Serapuh. Permasalahan yang berawal dari pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi areal perkebunan sawit dan pertambakan hingga mengakibatkan kondisi krisis di Desa Kwala Serapuh seperti berkurangnya pendapatan mereka sebagai nelayan tradisional. Adapun pengrusakan yang terjadi yaitu dengan cara pembakaran yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menanam kelapa sawit. Rusaknya wilayah kelola nelayan dan masyarakat Desa Kwala Serapuh berakibat hilangnya sumber pendapatan ekonomi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem mangrove.

Masyarakat desa kwala serapuh sangat keras menolak atas pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi lahan industry kelapa sawit yang di lakukan oleh perusahaan. Berbagai penolakan terjadi atas perbuatan hal tersebut, masyarakat terus bersikokoh untuk kelestaraan hutan mangrove desa kuala serapuh. Atas perusakan lingkungan oleh oknum tidak bertanggung jawab, masyarakat

melaporkan kepada berbagai institusi negara namun belum ada tindakan sampai sekarang.

Arah perkembangan hutan adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Hutan sebagai salah satu ekosistem, pengelolaannya perlu ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (GBHN: 1993, dalam Oky Priananta:2008).

Konflik perebutan sumberdaya alam menjadi salah satu konflik utama di Indonesia, baik dari sisi frekuensi maupun intensitasnya. Konflik ini juga secara langsung memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas lokal yang mempertahankan wilayah hidupnya. Dengan terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan atas permasalahan pengalihan fungsi lahan, hal ini mendorong pihak walhi terjun untuk mengadvokasi permasalahan tersebut agar hak masyarakat dapat dikembalikan serta mengembalikan keberfungsian hutan lindung semana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait “Peran Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab. Langkat

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab. Langkat?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulis dalam suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai Peran Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab. Langkat.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Akademis
  - a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada peran program wilayah kelola rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Kwala Serapuh Kab.Langkat dan menambah pengetahuan tentang program wilayah kelola rakyat dalam pengelolaan hutan rakyat.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta menambah literatur perpustakaan universitas muhammadiyah sumatera utara mengenai program wilayah kelola rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### **1.4 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian an Manfaat Penelitian

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, pada bab ini dimungkinkan mengajukan beberapa teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topic skripsi.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis Peneitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan Deskripsi data narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Peran**

Menurut Syamsir, Torang (2014:86) peran dalam terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Menurut Arimbi Horeopoetri dan Achmad Sentosa (2003:15) ada beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya

dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan peran.

## **2.2 Program Wilayah Kelola Rakyat**

### **2.2.1 Pengertian Program Wilayah Kelola Rakyat**

Wilayah kelola rakyat (WKR) adalah ruang hidup masyarakat dengan sistem kelolanya yang integratif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.

(Sumber dari: Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara)

### **2.2.2 Tujuan Program Wilayah Kelola Rakyat**

Program Wilayah Kelola Rakyat bertujuan untuk memperkuat hak-hak rakyat dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengakuan dan perluasan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) di Indonesia. Didalam mandat organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tersebut secara utuh, ada dua ranah yang harus diampu oleh organisasi secara sinergis :

1. Bagaimana negara dapat secara tegas dalam kebijakannya merekognisi eksistensi wilayah kelola rakyat (WKR) dengan segala keragaman yang dimilikinya. Rekognisi ini sebagai pilihan taktis untuk mempercepat penguraian kerumitan masalah yang dihadapi masyarakat serta untuk memberikan nafas masyarakat dalam menata menatap masa depannya secara merdeka.
2. Bahwa untuk menjangkau pencapaian tujuan strategis berupa tatakelola sumber daya alam dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat yang didukung oleh eksistensi kelembagaannya yang inklusif dan mencerahkan serta perencanaan aksi-aksinya yang terukur dan sistematis. Ketiga situasi idealita tersebut hanya dapat tercapai jika dilakukan penguatan masyarakat melalui proses pengorganisasian yang sistematis, terukur dan terkoneksi.

(Sumber dari: Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara)

### **2.2.3 Program Wilayah Kelola Rakyat Sebagai Pendekatan Advokasi**

Wilayah kelola rakyat (WKR) merupakan subjek baru yang sengaja dimunculkan dalam khazanah advokasi dan kampanye WALHI paska sistem hutan kerakyatan (SHK) pada era 90-an. Perluasan subjek tersebut bukan karena isu SHK kemudian didelegasikan ke KpSHK sebagai instrumen kelembagaan khusus yang dibentuk, namun juga karena ada kebutuhan untuk

mengakomodasi keragaman yang ada di tubuh WALHI baik terkait dengan karakter kelembagaan anggota organisasi, kekhasan isu yang ditangani serta keragaman wilayah kerjanya.

wilayah kelola rakyat (WKR) ini juga diharapkan dapat membantu membangun kohesifitas dalam melihat dan mendudukan subjek dari komunitas yang diorganisir oleh lembaga-lembaga “pendamping”. Sehingga cara fikir dan cara kerja kita dalam kerangka makro strukturalnya tidak terfragmentasi oleh sektor dan/subsektor isu yang biasanya melekat pada karakter kelembagaan pendampingnya, seperti kelompok petani, masyarakat adat, nelayan, urban dll.

Pendekatan advokasi yang konprehensif ini tentunya akan membawa konsekuensi pada lembaga, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia, sistem, serta alokasi waktu yang lebih banyak lagi di komunitas. Seluruh Konsekuensi tersebut adalah keniscayaan dari perjalanan aksi untuk mewujudkan mimpi besar terkait hak-hak rakyat dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Sumber dari: Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara)

#### **2.2.4 Sistem Kerja Program Wilayah Kelola Rakyat**

##### **1. Tata kuasa**

Tata Kuasa adalah sistem penguasaan wilayah kelola rakyat baik dalam relasinya secara struktural (dengan pemerintah, korporasi) maupun secara horisontal (antar masyarakat). Tata kuasa ini sangat terkait erat dengan aspek tenurial dimana sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah.

##### **2. Tata kelola**

Tata kelola adalah kaidah atau sistem untuk menjalankan dan mengendalikan atas ruang/wilayah kelola rakyat baik melalui tatanan nilai adat/lokal, maupun melalui tatanan aturan hukum formal yang telah disinergikan dengan nilai-nilai adat/lokal. Dalam konteks keberlanjutan ruang kehidupan ini maka dalam penata kelolaan wilayah kelola rakyat harus memenuhi kaidah keseimbangan ekosistem dan jaminan keberlanjutan.

##### **3. Tata produksi**

Tata produksi, solidaritas inklusif adalah salah satu nilai dan prinsip dasar dari kelembagaan ekonomi di Indonesia bernama KOPERASI yang digaungkan Mohammad Hatta. Empati sesama yang bersifat terbuka dan membuka diri atas dinamika komunitasnya ini adalah jawaban konkrit atas kejumudan fikir dan aksi yang dibangun dan dikembangkan kaum ekonom kapitalis.

#### 4. Tata konsumsi

Tata konsumsi merupakan kaidah atau sistem yang mengatur pola pemanfaatan/pemakaian produk dari wilayah kelolanya untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan warga. Dalam tata konsumsi, ditekankan agar adanya pemahaman arti nilai dan fungsi ekosistem secara komprehensif sehingga dapat tercipta kultur atau budaya saling mengisi dan melindungi antara masyarakat dengan lingkungannya.

#### **2.2.5 Struktur Kerja Program Wilayah Kelola Rakyat**

Adapun struktur kerja yang terdapat di Program Wilayah Kelola Rakyat antara lain sebagai berikut :

1. Dokumentasi Wilayah Kelola rakyat (WKR) di masing-masing daerah, peran ini akan dilakukan oleh ED (Eksekutif Daerah) dengan format isian data yang sudah disiapkan.
2. Identifikasi WKR potensial yang menjadi focus kerja pertahun, dimana penetapan focus wilayah tahunan akan mengacu pada hasil kajian tm PWKR Eknas.
3. Peningkatan kapasitas bagi komunitas pengelola sumber daya alam, adapu jenis Capacity Building akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas.

4. Memfasilitasi komunitas dengan jaringan terdekat, seperti relasi jaringan yang akan dihubungkan langsung dengan komunitas diantaranya: lembaga pembiayaan, lembaga pendampingan UKM, pasar-pasar alternative.
5. Distribusi dan pemasaran produk komunitas, untuk mendukung promosi dan pemasaran akan dibentuk unit manajemen sendiri.

### **2.2.6 Rencana Kegiatan Peningkatan Program Wilayah Kelola Rakyat di Desa Kwala Serapuh**

#### 1. Pengorganisasian masyarakat

- a. Diskusi Komunitas Masyarakat Rutin
- b. Pembentukan kelembagaan organisasi masyarakat
- c. Pendampingan dan penguatan organisasi masyarakat
- d. Training advokasi kebijakan
- e. Training Sistem Keamanan dan Environmental Human Right Defender

#### 2. Pemetaan partisipatif wilayah Kelola masyarakat dan ekosistem esensial yang terdegradasi untuk dipulihkan

- a. Pengadaan peralatan pendukung pemetaan partisipatif
- b. Training pemetaan partisipatif dan Identifikasi Kawasan
- c. Pelaksanaan pemetaan partisipatif dan Identifikasi Kawasan
- d. Workshop hasil pemetaan partisipatif dengan pihak terkait
- e. Asistensi dan pendampingan

3. Advokasi kebijakan di tingkat lokal terhadap perlindungan dan pemulihan wilayah Kelola Masyarakat berbasis ekosistem di Jawa Tengah dan Sumatera Utara
  - a. Pengajuan proposal pengakuan dan pemulihan wilayah Kelola masyarakat berbasis ekosistem
  - b. Dialog kebijakan dengan pemerintah di tingkat desa dan kabupaten
  - c. Diskusi publik untuk mendorong pengakuan dan pemulihan wilayah Kelola masyarakat
  - d. Lobby ke pemerintah desa dan pemerintah daerah
4. Penguatan kapasitas masyarakat untuk membentuk kelembagaan ekonomi
  - a. Training peningkatan kapasitas terkait model kelembagaan ekonomi
  - b. Asistensi dan pendampingan perencanaan bisnis kelembagaan ekonomi
  - c. Pengadaan dan membangun ekosistem digital dalam operasional kelembagaan ekonomi
  - d. Bantuan teknis permodalan dan akses terhadap permodalan
  - e. Training dan pendampingan akses pasar dan pola distribusi
  - f. Training dan produksi, pasca produksi dan pengemasan produk
  - g. Demonstration Plot kolaborasi bertema silvofishery/ aquafarming/ ecotourism
5. Penguatan kapasitas adaptasi masyarakat berbasis ekosistem
  - a. Assessment kerentanan komunitas terkait dampak perubahan iklim (menggunakan modul Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks-PACDR)

- b. Training penguatan kapasitas adaptasi masyarakat berbasis ekosistem
- c. Membangun sistem peringatan dini bencana iklim di tingkat komunitas

6. Penguatan sistem komunikasi daring untuk mempermudah koordinasi di tengah pandemi

- a. Pengadaan alat pendukung komunikasi secara daring
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan alat komunikasi daring
- c. Mengintegrasikan sistem informasi daring peringatan dini bencana
- d. Pembuatan produk pengetahuan (Buku, Modul, Buletin, dll) untuk komunitas

7. Kampanye Publik

- a. Produksi materi kampanye digital untuk sosial media
- b. Konferensi pers
- c. Dialog redaksi
- d. Aksi

(Sumber dari: Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara)

### 2.3 Kesejahteraan

Menurut Sugeng Pujileksono (2016:13) Kesejahteraan adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, sosial, intelektual dan spiritual dan kemampuan mengembangkan diri sehingga dapat menunjang pencapaian hidup yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Menurut kolle (dalam Sugeng Pujileksono 2016:11) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu :

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuain dan sebagainya.

Menurut Skoufias (2003) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan obyektif menggunakan patokan tertentu yang relative baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak .

#### **2.4 Kesejahteraan Ekonomi**

Menurut pigou (1960:11) teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat dikaitkan dengan dua hal yaitu : kesejahteraan subjektif dan obyektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan dan ketidakpuasan merupakan indicator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti tidak adanya air bersih, merupakan contoh indicator obyektif.

Menurut Lincoln arsyad (1999:23) kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat

distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Adanya ilmu kesejahteraan ekonomi membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit untuk menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Maka dari itu adanya kajian mengenai kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

Menurut Revrisond Bawsir (dalam Wardatul Asriyah 2007:19) ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah ungkapan dari demokrasi ekonomi dengan pengacuan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, para penyusun Undang-undang Dasar 1945 secara resmi menggeser isu ekonomi rakyat (*people economy*) menjadi ekonomi kerakyatan (*people centered economy*). Sasaran utama dari ekonomi kerakyatan adalah dihapuskannya stratifikasi status ekonomi masyarakat baik berdasarkan rasa tau suku bangsa, maupun dari modal atau tingkat penguasaan faktor-faktor produksi.

Menurut Hendri Anto (2003:7) ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Secara terperinci tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
3. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Kesamaan hak dan peluang.
7. Kerjasama dan keadilan.

## 2.5 Desa

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) Desa merupakan masyarakat hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun keamanan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki susunan pengurus yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa telah memberikan keleluasan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingna masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Nora Susilawati 2012:8) kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki yaitu :

1. Mereka memiliki sifat yang homogeny dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku.
2. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya adanya keterkaitan, anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
4. Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak.

Menurut Dadang Djoko Karyanto (2014:3) permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan public dan pasar.
2. Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain.

3. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan.
4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur.

(<http://dadangdjoko.blogspot.com/2014/05/permasalahan-yang-dihadapi-dalam.html>)

diakses pada 29 maret 2021 pukul 5.18 wib)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

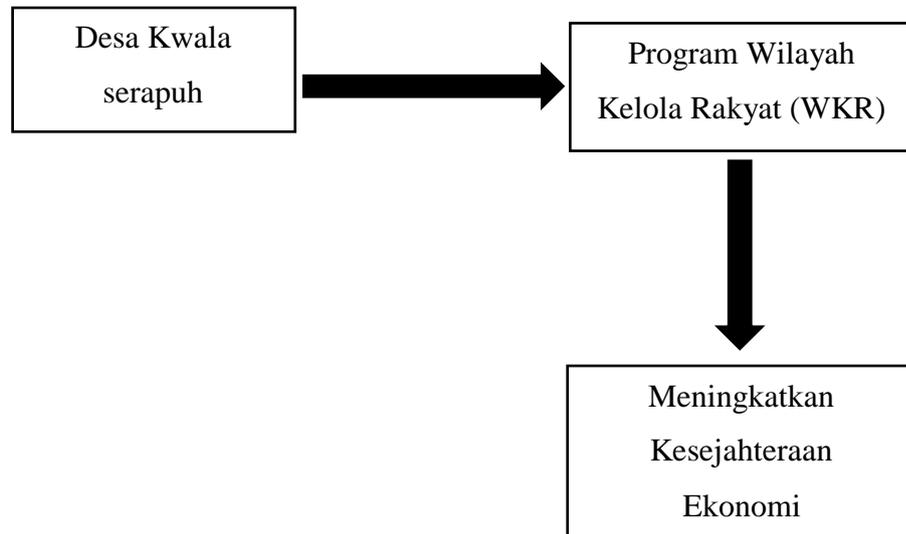
#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif merupakan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2008:29) Metode Deskriptif yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsi atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Maka dari itu, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi.

Dengan demikian berdasarkan konsep teori dari pendekatan kualitatif deskriptif ini akan menggambarkan tentang bagaimana Peran Wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kwala Serapuh Kab. Langkat. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran yang dijalankan program di lapangan.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012:82) kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Biasanya kerangka ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan variabel dalam proses analisisnya.



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

### 3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan serangkaian pernyataan, gagasan, atau ide yang saling berkaitan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan dapat menjadi sebuah petunjuk atau dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan lainnya.

Maka dari itu, yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Program Wilayah Kelola Rakyat merupakan sebuah sistem kelola yang integrative dan partisipatif baik dalam proses tata kelola, produksi, distribusi, dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Desa Kwala Serapuh merupakan salah satu desa dalam program wilayah kelola rakyat, yang mendapatkan izin Hkm-PS dilokasi wilayah perhutanan sosial oleh Walhi-Sumut bersama kelompok tani nipah.
3. Kesejahteraan Ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, yang berdasarkan penggolongan dan hasil pengelompokan unsur Bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan ke dalam kategori (Idrus:2008).

Kategorisasi	Indikator
Program Wilayah Kelola Rakyat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tata kuasa</li><li>b. Tata kelola</li><li>c. Tata produksi</li><li>d. Tata konsumsi</li></ul>
Kesejahteraan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan pendapatan</li><li>b. Pekerjaan</li><li>c. Pendidikan</li></ul>

Tabel 3.4 Kategorisasi

### 3.5 Informan/Narasumber

Menurut Sugiyono (2014:52) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang akan kita harapkan dan memudahkan penelitian dalam menjelajahi objek yang ingin diteliti.

Sampel dari penelitian ini adalah Direktur Walhi-Sumut, Deputi II Bidang Program dan PME, dan 5 orang penerima manfaat Program Wilayah Kelola Rakyat. Berikut data dari Narasumber-Narasumber penelitian ini:

Pelaksana Program	Penerima Manfaat
1. Doni Latuparisa (Direktur Eksekutif Daerah Walhi-Sumut)  2. Rianda Purba (Deputi 2 Bidang Program dan PME)	1. Syamsul Bahri (55tahun, Islam, Sd, Ketua Kelompok Tani Nipah)  2. Ponirin (42tahun, Islam, Stm, Sekretaris Desa)  3. Syamsir (33tahun, Islam, Smp, Anggota Kelompok Tani Nipah)  4. Wahyudin

	(43tahun, Islam, Smp, Anggota Kelompok Tani Nipah)
	5. Miad (40tahun, Islam, Smp, Anggota Kelompok Tani Nipah)

Tabel 3.5 Narasumber Penelitian

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang bersangkutan. Menurut Riduwan (2010:51) Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada didalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a. Teknik Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu, dan perasaan

- b. Teknik wawancara (interview), yaitu suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan terhadap dua atau lebih dengan mekanisme tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan oleh informan.

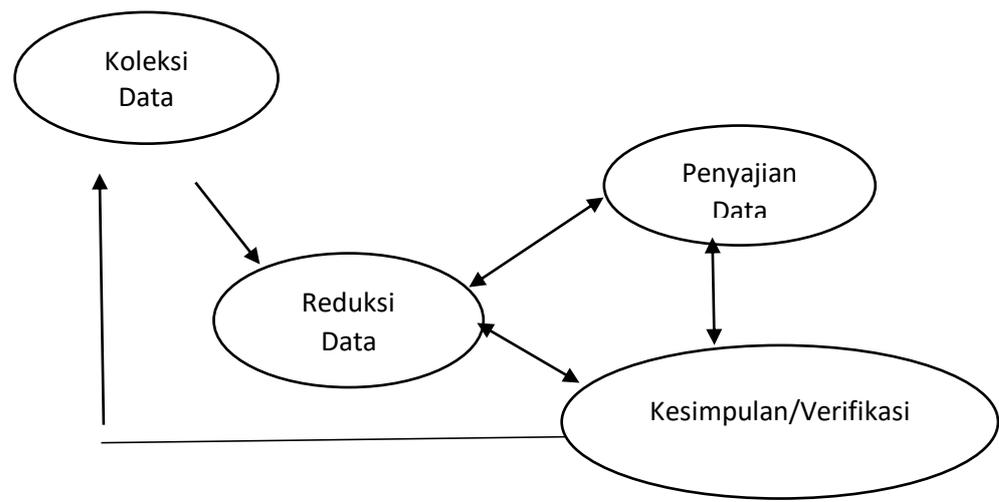
## 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang berada diluar lapangan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. selain itu bahan bacaan cetak, media elektronik dan sumber online juga membantu dalam penelitian ini untuk menemukan teori dan penunjang terkait dengan masalah yang dikaji.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2018:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 6.7 Teknik Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer dan lain-lain.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

#### c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang merupakan lokasi program Wilayah Kelola Rakyat dilaksanakan dan telah ditetapkan oleh Walhi-Sumut. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana Peran Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) minggu.

### 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Kwala Serapuh Kab. Langkat merupakan salah satu tempat Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang dilaksanakn oleh Walhi-Sumut. Dimana sebagian sumber pendapatan ekonomi masyarakat desanya bergantung pada ekosistem mangrove. Wilayah Desa Kwala Serapuh Merupakan wilayah yang mengalami pengalihan fungsi hutan mangrove yang menjadi areal perkebunan sawit dan pertambakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya pengalihan fungsi hutan mangrove tersebut mengganggu sumber pendapatan masyarakat desa. berdasarkan SK 579 tentang penunjukan kawasan hutan, perkebunan dan tambak tersebut sebagian besar berada di kawasan yang berstatus hutan. Di Desa Kuala Serapuh, Bubun, dan Gebang kabupaten Langkat, perambahan dan alih fungsi kawasan hutan mangrove mulai terjadi pada akhir tahun 1990-an sampai saat ini. Pengusaha mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan dilengkapi SK Desa dan Camat. Keseluruhan luas sawit dan areal tambak di ketiga desa yang saling berbatasan ini mencapai lebih kurang 3000-an hektare.

Pada tahun 2016, warga menginisiasi berdirinya Kelompok Tani Nipah sebagai wadah perjuangan menyelamatkan ekosistem mangrove di desanya. Dan didampingi oleh Walhi-Sumut selaku Pelaksana Prograam Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

### 3.9.1 Gambaran Umum Desa Kwala Serapuh

1. Letak Lokasi : 04
2. Batas Areal Kerja :
  - Utara : Berbatasan dengan kawasan hutan produksi
  - Timur : Berbatasan dengan kawasan hutan produksi
  - Selatan : Berbatasan dengan sungai sei serapuh
  - Barat : Berbataan dengan kawasan hutan produksi
3. Keadaan Fisik Wlayah:
  1. Karakteristik tanah: Berlumpur dan berpasir
  2. Topografi : Datar (kelerengan 0-8%)
  3. Ketinggian : 4m dpl
  4. Pohon dominan : *Nypha sp* dan
  5. Tanaman lain : *Rhizopora sp* dan *Elaesis Guineensis*
4. Keadaan Sosial Ekonomi
  1. Jumlah penduduk : 1.731 jiwa
    - Laki-laki : 875 jiwa
    - Perempuan : 856 jiwa
  2. Pekerjaan/Mata Pencaharin Penduduk
    - Petani dan Buruh Tani : 47,18%
    - PNS : 0,81%
    - Pedagang : 1,01%
    - Nelayan : 49,19%
    - Wiraswasta : -

- Lain-lain : 1,81%
3. Prasarana Pendidikan
- Gedung sekolah PAUD : - unit
  - Gedung sekolah TK : - unit
  - Gedung sekolah SD : 3 unit
  - Gedung Sekolah SMP : 1 unit
  - Gedung sekolah SMA : - unit
4. Prasarana Kesehatan
- Puskesmas pembantu : 1 unit
  - Posyandu : 1 unit
  - Tangki air bersih : 5 unit
5. Prasarana Ibadah
- Masjid : 2 unit
  - Musholla : 4 unit
6. Produksi Unggulan Desa
- Perkebunan : kelapa sawit
  - Perikanan : tenggiri
  - Peternakan : sapi dan kambing
  - Hasil Hutan : nipah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di Desa Kwala Serapuh untuk mengetahui program wilayah Kelola Rakyat (WKR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, pada bab ini menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada bab ini juga membahas mengenai hasil dari setiap data yang diperoleh.

Menganalisis data merupakan suatu upaya untuk mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan kategorisasi yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, serta dapat melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian data yang berdasarkan kategorisasi.

Berikut merupakan penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dari informan, catatan lapangan dengan mengamati keadaan dan situasi yang ada di Desa Kwala Serapuh. Untuk mengetahui Peran Program wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kwala Serapuh peneliti mewawancarai pelaksana program yaitu Direktur Eksekutif Daerah Walhi-Sumut, Manajer Kampanye dan Penguatan Rakyat, Deputi II bidang Program dan

pme, dan 5 orang penerima manfaat di Desa kwala Serapuh berdasarkan Kategorisasi :

#### 1. Tata kuasa

Tata kuasa merupakan berkaitan dengan kebijakan penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan oleh masyarakat desa. Sebagai komponen penting penunjang dasar kehidupan masyarakat, aspek tata kuasa ini memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan segera seperti kasus pada tumpang tindih klaim antar para pihak dan terkait dengan aspek ketidakadilan dalam penguasaan.

Untuk mengetahui bagaimana Tata Kuasa berperan di desa Kwala Serapuh yang ada di dalam program Wilayah Kelola Rakyat (WKR), peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif Daerah Walhi-Sumut yaitu Bapak Doni Latuparisa selaku pelaksana program

Ketika ditanya mengenai apa itu Tata Kuasa dalam program Wilayah Kelola Rakyat yang dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh Bapak menjawab :

“ Tata Kuasa itu berbicara tentang penyelesaian konflik tenorial, misalnya masyarakat yang sudah tinggal lama disekitar hutan tetapi dia belum memiliki legal akses untuk mengelola wilayah yang dikelola selama ini, di tata Kuasa ini terdapat beberapa skema yaitu skema perhutanan sosial dan skema tanah objek reforma agrarian, maka dari itu wilayah kelola rakyat ditata kuasa ini berbicara tentang legal akses. (Hasil Wawancara dengan Bapak Doni Latuparisa pada tanggal 20 Agustus 2021)

Pertanyaan selanjutnya diajukan kembali kepada pelaksana program mengenai bagaimana Tata Kuasa dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Doni Latuparisa, dan Bapak menjawab:

“Kita menjembatani atau memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah 1 di Stabat yang menghasilkan pada akhir 2017 lalu, Kelompok Tani Nipah mendapatkan SK perjanjian pengelolaan hutan, itu kita fasilitasi pertemuan-pertemuan itu, kemudian kita juga memfasilitasi proses usulan dokumennya dari mulai subjek dan objek, subjeknya yaitu kelompok tani nipah dan membantu proses dibentuk dan diakui di tingkat desa, kemudian dilakukan pemetaan diwilayah ditempat mereka kelola, sehingga dokumen mereka mendapatkan ijin pengelolaan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Doni Latuparisa pada tanggal 20 Agustus 2021)

Adapun isi dari SK tersebut mengenai berbasis kemitraan dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) 1 (satu) Stabat. Kemudian, Pengelolaan Hutan Kemitraan oleh Kelompok Tani Nipah semakin diperkuat dengan adanya SK Nomor SK.6187/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Kelompok Tani Nipah Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Seluas lebih kurang 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) Hektare), Pemerintah Provinsi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular.

Dari penjelasan wawancara di atas adapun program Tata Kuasa Dalam Wilayah Kelola Rakyat (WKR) telah dilaksanakan dan penerima manfaat telah mengikuti program. Seperti menjembatani pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang berkepentingan dalam membantu untuk mendapatkan legal akses tersebut, pada nyatanya adanya legal akses ini sangat membantu dalam pemulihan ekosistem yang ada hingga dapat kembali melakukan pengelolaan wilayah mereka.

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada penerima manfaat Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) mengenai Bagaimana sebelum adanya Legal Akses, apakah terdapat penguasaan wilayah di Desa Kwala Serapuh, jika ada apakah mengganggu proses pendapatan ekonomi masyarakat yang ada. Pertanyaan ditujukan pada Sekretaris Desa/Sekretaris Kelompok Tani Nipah yaitu Bapak Ponirin. Bapak menjawab :

“Sebelum adanya legal akses tentang pengelolaan wilayah, ya terganggu dalam proses pendapatan ekonomi karna adanya sengketa, sedikit banyaknya warga mengelola dari kawasan hutan, seperti mengambil daun pucuk nipah, mencari hasil tangkapan kepiting tidak bisa, karena wilayah tangkapan kepiting tersebut disekat atau paluh ada yang di tutup. Tapi semenjak melakukan kerja sama pada pihak terkait seperti kehutanan, kph, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita dapat kembali melakukan aktivitas walaupun dilapangan terkadang masih ada gangguan dari pihak sengketa tadi ” (Hasil wawancara dengan Bapak Ponirin 14 September 2021)

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pelaksana program dan penerima manfaat, peneliti melakukan observasi di Desa Kwala Serapuh, maka penulis merasa bahwa adanya legal akses ini sangat membantu dalam pemulihan pendapatan

ekonomi serta peluang kerja masyarakat melalui pendampingan kelompok tani nipah dengan orang-orang berkepentingan dalam mendapatkan kembali hak akses dalam mengelola wilayah masyarakat Desa Kwala Serapuh.

## 2. Tata Kelola

Tata Kelola adalah sistem untuk menjalankan dan mengendalikan pemanfaatan ruang atau wilayah pedesaan. Meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan, namun faktualnya belum dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan, apalagi dengan melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.

Perencanaan ruang untuk masing-masing wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanna dan wilayah karst memiliki cara dan pendekatan wilayah yang berbeda-beda. Karenanya penting untuk melakukan penelahan yang mendalam (seperti melakukan KLHS) dengan melihat aspek daya dukung lingkungan serta nilai dan kearifan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola berperan dalam Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif Daerah Walhi-Sumut yaitu Bapak Doni Latuparisa selaku pelaksana program

Ketika ditanya mengenai Tata Kelola dalam program Wilayah Kelola Rakyat yang dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh Bapak menjawab:

“Tata Kelola berbicara tentang bagaimana kelembagaan ataupun perorangan dari kelompok atau komunitas masyarakat itu mampu mengelola wilayah kelolanya itu dengan maksimal, jadi peningkatan kapasitas kemudian manajemen kelembagaannya dirapikan kemudian dibentuk koperasi atau kelompok tani, kelembagaan-kelembagaan ini lah yang menjadi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola mereka baik organisasi secara internal ataupun eksternal tata kelola. Yang telah kita lakukan dalam menjalankan program ini di Desa Kwala Serapuh kita melakukan peningkatan kapasitas mereka seperti pelatihan hbk, gender dan pelatihan manajemen kelembagaan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Doni Latuparisa pada tanggal 20 Agustus 2021)

Pertanyaan selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada penerima manfaat mengenai apakah Tata Kelola berpengaruh dalam peningkatan pendapatan di Desa Kwala Serapuh di tujukan kepada Bapak Miad dan Bapak menjawab :

“iya, berpengaruh karena didalam tata kelola ini kami diberi pelatihan bagaimana mengelola hasil dari hutan atau hasil hutan bukan kayu, disini kami dikasi pemahaman bagaimana cara memanfaatkan kembali hasil hutan tetapi tetap terjaga ekosistem yang ada didesa kami atau tidak merusak lingkungan yang ada karena jika hutan lestari maka masyarakat sejahtera”. (Hasil wawancara dengan Bapak Miad pada tanggal 14 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan penerima manfaat menerima dalam program wkr di pengelolaan di wilayah mereka, yang mana mereka dapat memanfaatkan kembali hasil dari wilayah hutan yang dapat menjadi produk unggulan desa mereka, dan tetap menjaga keadaan lingkungan yang lestari.

### 3. Tata Produksi

Tata Produksi merupakan proses menghasilkan suatu produk baik itu sandang pangan, papan, energy dll, yang berbasis pada potensi di wilayah desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Didalam tata produksi prde hrs meihat daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam serta tidak memunculkan masalah baru.

Untuk mengetahui bagaimana Tata Produksi berperan dan menjalankan proogramnya, peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana program yaitu Bapak Rianda Purba selaku Deputy 2 Bidang Program dan PME Walhi-Sumut

Ketika ditanya mengenai Tata Produksi mengenai apa saja yang telah dilakukan didalam program ini di Desa kwala Serapuh dan Bapak Menjawab :

“Untuk tata produksi, Walhi-Sumut selaku pelaksana program saat ini mendorong pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu pucuk nipah. Hal ini juga sejalan dengan basis produksi potensial di areal kelola hutan masyarakat, yaitu hutan pesisir yang ditumbuhi nipah dan bakau. Sampai saat ini, Walhi-Sumut memang masih mendorong, pengembangan potensi pemanfaatan hutan tersebut, pucuk nipah yang diambil hasilnya oleh kelompok setiap harinya dan langsung dijual kepada pengepul. Untuk tata produksi hingga distribusinya, kelompok tani nipah memang sudah bisa mengelolanya secara mandiri, maka dari itu kita juga mendorong melalui program pengembangan potensi dari produksi hingga distribusinya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rianda Purba pada tanggal 22 September 2021)

Pertanyaan selanjutnya diajukan kembali kepada Bapak Rianda Purba selaku Pelaksana program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) mengenai bagaimana proses pengembangan yang telah dilaksanakan dan bapak menjawab:

“Proses pengembangan produksi yang dilakukan yaitu melalui kegiatan peningkatan kapasitas adapun peningkatan kapasitasnya melalui pelatihan pembuatan produk HHBK Mangrove, Packaging Produk, dan kerajinan tangan lainnya yang bersumber dari hasil hutan non kayu. Pada tahap selanjutnya, saat tata produksi mangrove tersebut semakin baik pengelolaannya, Walhi-Sumut akan mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi, hal ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis hbk kelompok tani nipah bersaing di pasaran, dan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengurus dan kelompok tani nipah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rianda Purba 22 September 2021)

Pertanyaan selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada penerima manfaat mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam Tata Produksi dilaksanakan di Desa Kwala Serapuh ditujukan kepada seseorang yang bernama Bapak Wahyudin dan bapak menjawab :

“Didalam program ini kita melakukan pendampingan bersama oleh pihak Walhi-Sumut, biar hasil produksi kita dapat diterima sama orang banyak, disini kita juga dibimbing bagaimana mengoila hasil dengan baik dan tidak merusak ekosistem yang ada. yang kita produksi yaitu mengambil hasil nipah, pucuknya kita ambil, terus dijual ke pengepul. Soalnya kalau untuk mengolah sendiri kita belum ada dana, disini kurang modal untuk itu. Kita ngambilnya perharinya, ada jadwal kerjanya, jadi kita setiap harinya bergantian untuk mengambil pucuk nipahnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin pada tanggal 14 September 2021)

Selanjutnya pertanyaan diajukan kembali kepada penerima manfaat mengenai Apakah Tata Produksi ini membantu dalam meningkatkan ekonomi serta

membantu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari ditujukan kepada Bapak Wahyudin dan bapak menjawab :

“iya sangat membantu, karena hasil dari produksi ini setelah kita jual ke pengepul, uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena hasilnya sangat lumayan untuk memenuhi kehidupan kelaga.” (Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin pada tanggal 14 September 2021)

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada penerima manfaat dan peneliti melakukan observasi di Desa Kwala Serapuh mengenai Tata Produksi. Masyarakat telah dapat mengelola hasil dari olahan mereka yaitu pucuk nipah menjadi lebih baik melalui kegiatan peningkatan kapasitas adapun peningkatan kapasitasnya melalui pelatihan pembuatan produk HHBK Mangrove, Packaging Produk, dan kerajinan tangan lainnya yang bersumber dari hasil hutan non kayu, dan dapat membantu pendapatan ekonomi dirumah sehingga membantu kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

#### 4. Tata Konsumsi

Tata Konsumsi merupakan pengaturan pola konsumsi masyarakat desa yang harus dapat memperkuat relasi dengan potensi komoditinya, serta pengaturan distribusi produk masyarakat desa keluar yang harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa sebagai produsen.

Untuk mengetahui bagaimana Tata Konsumsi berperan dalam Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) di Desa Kwala Serapuh, peneliti melakukan

wawancara dengan pelaksana program yaitu Bapak Rianda Purba selaku Deputy 2 Bidang Program dan PME Walhi-Sumut

Ketika ditanya mengenai Tata Konsumsi berperan di Desa Kwala Serapuh Bapak menjawab :

“Mengenai Tata Konsumsi, kita Walhi-Sumut selaku pelaksana program belum secara khusus mendorong pengembangannya. Hal ini dikarenakan masih adanya persoalan Tata Kuasa atau penguasaan hutan yang saling tumpang tindih, meskipun secara legal kelompok tani nipah sudah memiliki izin perhutanan sosial-Kulin KK dari KLHK. Tetapi disini kita juga telah melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dalam hal ini bang syamsir dan bang ponirin diajak dalam pertemuan Walhi di Manggala Bakti atau Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan pada tahun 2019November, dan 2020 februari membawa Bang ponirin kembali selaku Sekretaris Desa untuk Pameran Pucuk nipah di Jakarta Gedung YTKI, nah disitu kita memasarkan secara nasional agar dapat membantu pendapatan mereka dan hasil produksi mereka dapat dikenal lebih luas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rianda Purba pada Tanggal 22 September 2021)

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada penerima manfaat mengenai bagaimana tata konsumsi berjalan di Desa Kwala Serapuh ditujukan kepada Bapak Pardi dan bapa menjawab :

“Di tata konsumsi kita belum dapat leluasa melakukannya karena kita masih ada persooalan kuasa lahan itu, yang mana masih berkonflik, makanya kelolanya juga belum maksimal, pendampingan dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah stabat juga enggak ada, ya disini kita berinsiatif sendiri. Tetapi dari pihak pelaksana program ataupun Walhi-Sumut ngajak beberapa dari kita untuk memperkenalkan produk kita di Jakarta, setidaknya itu juga sudah suatu kebanggaan sama kita, karena proiduk kita diperkenalkan secara nasional” (Hasil wawancara dengan Bapak Pardi pada tanggal 14 September 2021)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan penerima manfaat dan melakukan observasi dilapangan maka peneliti merasa bahwa di Tata Konsumsi ini belum sepenuhnya mendapat hasil yang memuaskan karena adanya permasalahan sengketa walaupun pihak masyarakat atau kelompok tani nipah telah mendapatkan surat izin kelola. Tetapi didalam program ini juga telah melakukan uipaya agar prouduk mereka tetap dapat di publish sehingga produk mereka dapat diteriima masarakat umum.

#### 4. Kesejahteraan Ekonomi

Tujuan Program Wilayah Kelola Rakyat(WKR) adalah agar masyarakat mendapatkan hak atas pengelolaan lahan, yang mana ketimpangan kekuasaan lahan sangat berkaitan dengan sumber ekonomi antara rakyat dan korporasi. Karena pada dasarnya kemiskinan yang masih mendominasi wilayah perdesaan, termasuk di dalamnya desa-desa sekitar hutan. Dalam arti lain bahwa kekayaan sumber daya alam tidak serta merta berjalan paralel dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya. Adanya ilmu kesejahteraan ekonomi membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga (Lincoln Arsyad 1999:23). Maka dari itu program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat desa agar dapat meningkatkan kehidupan yang layak dengan mengelola hasil sumber daya alam yang ada di wilayah kelola mereka, dan dapat menjaga lingkungan hutan agar tetap menjaga ekosistem yang ada.

Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kwala Serapuh, peneliti melakukan wawancara dengan penerima manfaat yaitu Bapak Samsul Bahri selaku Ketua Kelompok Tani Nipah

Ketika ditanya mengenai apakah program Wilayah Kelola rakyat (WKR) ini berperan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Bapak Menjawab:

“iya, sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan, karena kehutanan sosial ini apa yang dominan didalam hutan dan dapat berswakelola, maka dari itu semenjak perhutanan sosial ini dilestarikan oleh kelompok tani nipah artinya disitu ada tentang kelautan, nelayan pinggir, tentang abrasinya hutan, perbaikan hutan, nah dari perbaikan tersebut sangat berhasil dan membuat masyarakat itu bisa berdomisili didesanya kembali setelah desa itu lestari dalam kawasan hutan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri pada Tanggal 14 September 2021)

Pertanyaan selanjutnya peneliti mengajukan kembali pertanyaan kepada Bapak Samsul Bahri Apakah dengan adanya wilayah kelola rakyat ini dapat menjadi alternative pekerjaan masyarakat di Desa Kwala Serapuh dan Bapak Menjawab :

“iya, boleh dikatakan 100% dengan adanya Program Wilayah Kelola Rakyat atau Perhutanan Sosial ini masyarakat kembali menjadi berswakelola didalam kawasan hutan.” (Hasil Wawancara Dengan Bapak Samsul Bahri pada tanggal 14 September 2021)

Untuk membuktikan bahwa program Wilayah Kelola Rakat ini dapat memberikan pekerjaan yang menghasilkan bagi masyarakat, peneliti bertanya dan mengobservasi langsung kelapangan dan melihat bagaimana kegiatan yang telah

dilaksanakan, dan bertanya kepada penerima manfaat, yang bernama Bapak Samsir dan bapak menjawab :

“sebelum adanya Program WKR ini kami sebagian masih mencari rezeki seperti merantau atau segala macam, setelah ada program WKR atau perhutanan sosial ini, kami masyarakat desa sini sudah tidak merantau lagi mencari rezeki. Sedangkan hasil dari pendapatan ini juga sangat dapat membantu dalam membiayai anak-anak sekolah, karena pendapatan perhari yang kami hasilkan perorangnya ya bisa 120.000 sampai 130.000 rupiah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Samsir pada tanggal 14 November 2021

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka peneliti merasa bahwa dengan adanya program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) atau Perhutanan Sosial sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi serta memberi peluang kerja bagi masyarakat di Desa Kwala Serapuh. Jika dilihat dari pendidikan melalui observasi di lapangan maka peneliti merasa bahwa dengan adanya program ini tidak hanya dapat membantu dalam segi pendapatan ekonomi serta peluang kerja bagi masyarakat tapi dapat membiayai pendidikan anak-anak didesa tersebut, karena bertambahnya hasil pendapatan disetiap kepala keluarga.

#### **4.2 Pembahasan**

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Program Wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Kwala Serapuh. Peran program wilayah kelola rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa kwala serapuh sngi”atlah penting, karena berdasarkan

penelitian dan observasi sebelum adanya program ini pendapatan masyarakat sangat menurun diakibatkan oleh adanya pengalihan fungsi hutan mangrove yang menjadi areal perkebunan sawit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peneliti melakukan observasi tentang Bagaimana Peran Wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Kwala Serapuh Kab.Langkat melalui pelaksana program yaitu Walhi-Sumut dan penerima manfaat masyarakat Desa Kwala Serapuh atau Kelompok Tani Nipah.dan bagaimana program wkr ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat dan ukurannya yang ingin peneliti ungkap adalah apakah setiap didalam program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, peluang kerja, serta pendidikan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah ditemukan, program wilayah keloa rakyat yang dilakukan di Desa Kwala Serapuh dimulai dari 4 (Empat) tahap yaitu Tata Kuasa, Tata Kelola, Tata Produksi, dan Tata Konsumsi. Dimana keempat tahap ini memiliki peran masing-masing di Desa Kwala Srapuh.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membahas adapu didalam program yang telah diberikan kepada penerima manfaat yang telah dipaparkan diatas, berikut beberapa pembahasan tersebut :

#### 1. Tata Kuasa

Tata kuasa merupakan tentang penguasaan wilayah, yang tidak memiliki legal akses dalam mengelola wilayah yang ada, ataupun mengenai penyelesaian

konflik tenorial. Desa Kwala Serapuh merupakan salah satu wilayah yang mengalami penguasaan wilayah, dimana adanya pengalihan fungsi hutan menjadi areal perkebunan sawit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada. Perusakan wilayah yang terjadi mengakibatkan menurunnya hasil pendapatan masyarakat setempat.

Sebagai pelaksana program Walhi-Sumut menjembatani pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang berkepentingan dalam membantu untuk mendapatkan legal akses tersebut, pada nyatanya adanya legal akses ini sangat membantu dalam pemulihan ekosistem yang ada hingga masyarakat desa kwala serapuh dapat kembali berswakelola.

Adapun SK izin yang telah diperoleh oleh penerima manfaat yaitu SK Nomor SK.6187/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Kelompok Tani Nipah Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Seluas lebih kurang 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) Hektare).

## 2. Tata Kelola

Tata kelola merupakan sistem untuk menjalankan dan mengendalikan pemanfaatan ruang atau wilayah pedesaan. Dimana kelembagaan ataupun perorangan dari kelompok atau komunitasnya itu mampu mengelola wilayah kelolanya dengan maksimal

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap penerima manfaat, tata kelola telah dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas dalam pelatihan HHBk, gender serta manajemen kelembagaan. Didalam pelatihan ini juga memberikan manfaat terhadap masyarakat desa agar dapat mengelola produktivitas menjadi lebih baik yang terdapat di wilayah mereka, sehingga dapat tercapai pengembangan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan.

### 3. Tata Produksi

Tata produksi merupakan pemanfaatan kembali dari hasil produk yang dapat dikelola disuatu wilayah, dimana produk-produk turunan yang dihasilkan oleh masyarakat belum tentu dapat di terima oleh public atau umum, maka dari itu di tata kelola ini ditingkatkan lagi produktifitasnya sehingga dapat diterima oleh umum.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada penerima manfaat dan peneliti melakukan observasi di Desa Kwala Serapuh mengenai Tata Produksi. Masyarakat telah dapat mengelola hasil dari olahan mereka yaitu pucuk nipah menjadi lebih baik melalui kegiatan peningkatan kapasitas adapun peningkatan kapasitasnya melalui pelatihan pembuatan produk HHBK Mangrove, Packaging Produk, dan kerajinan tangan lainnya yang bersumber dari hasil hutan non kayu melalui , dan dapat membantu pendapatan ekonomi dirumah.

#### 4. Tata Konsumsi

Tata konsumsi merupakan pengaturan pola konsumsi masyarakat desa yang harus dapat memperkuat relasi dengan potensi komoditinya, serta pengaturan distribusi produk masyarakat desa keluar yang harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa sebagai produsen.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penerima manfaat, maka didalam tata konsumsi ini belum dapat berjalan dengan maksimal karena adanya tumpah tindih penguasaan wilayah, namun pelaksana program tetap mendorong agar bagaimana hasil produk pucuk nipah ini dapat diterima oleh masyarakat umum sehingga pendapatan mereka meningkat. Adapun hal yang telah dilakukan pelaksana program atau Walhi-Sumut yaitu pada November 2019 itu dua orang dari kelompok tani dalam hal ini bang syamsir dan bang ponirin diajak dalam pertemuan walhi di Manggala bakti atau kantor Kemeterian Lingkungan Hidup Kehutanan, jadi produk mereka itu pucuk nipah itu sudah dipasarkan secara nasional di Gedung Manggala Bakti atau Gedung KLHK, dan 2020 Februari membawa Ponirin atau Sekdes untuk pameran pucuk nipah di Jakarta Gedung YTKI jalan Gatsu begitulah cara-cara membantu dalam program wilayah kelola rakyat ini yang dijalankan oleh walhi.

#### 5. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan merupakan teripienuhnya kebutuhan sandang material, spiritual, dan sosial yang dapat memenuhi menjadi kehidupan yang layak, salah

satu dari kesejahteraan tersebut merupakan kesejahteraan ekonomi, yang mana dapat memenuhi material kebutuhan yang layak.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka peneliti merasa bahwa dengan adanya program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) atau Perhutanan Sosial sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi serta memberi peluang kerja bagi masyarakat di Desa Kwala Serapuh. Jika dilihat dari pendidikan melalui observasi di lapangan maka peneliti merasa bahwa dengan adanya program ini tidak hanya dapat membantu dalam segi pendapatan ekonomi serta peluang kerja bagi masyarakat tapi dapat membiayai pendidikan anak-anak di desa tersebut, karena bertambahnya hasil pendapatan di setiap kepala keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Program Wilayah Kelola Rakyat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kwala Serapuh dilihat dari program yang telah direncanakan oleh pelaksana program yaitu staf-staf Walhi-Sumut merupakan suatu hal yang telah dipertimbangkan dalam pencapaian untuk memudahkan masyarakat yang memiliki perhutanan sosial mengelola wilayahnya dengan bijak hingga dapat memberi hasil kepada masyarakat baik itu dalam kesejahteraan ekonomi.
2. Dari program-program yang telah dilaksanakan dalam Proram Wilayah Kelola Rakyat (WKR) di Desa Kwala Serapuh peneliti merasa bahwa disetiap program memiliki peran penting, seperti halnya di Tata Kuasa dimana dalam program ini penerima manfaat telah mendapatkan legal akses dalam mengelola wilayah mereka sehingga masyarakat desa kwala serapuh dapat kembali berswakelola di wilayahnya. Kemudian di Tata Kelola, pelaksana program telah melakukan pelatihan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), Gender dan Kelembagaan Maajemen, dan penerima manfaat merasa

penting dalam hal ini. Sementara di Tata Produksi, wilayah kelola rakyat ini memfasilitasi mereka untuk meningkatkan produktifitas dari hasil nipah tersebut. Sedaangkan di Tata Konsumsi penulis merasa bahwa untuk saat ini baik pelaksana progam maupun penerima manfaat belum dapat hasil yang begitu memuaskan, karena adanya tumpang tindih klaim wilayah sehingga membuat pergerakan terbatas dalam menjalankannya.

3. Untuk mencapai dalam kesejahteraan ekonomi menurut penulis sudah dapat dirasakan penerima manfaat karena telah memberi peluang kerja serta peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Desa Kwala Serapuh. Jika dilihat dari pendidikan melalui observasi dilapangan maka peneliti merasa bahwa dengan adanya program ini tidak hanya dapat membantu dalam segi pendapatan ekonomi serta peluang kerja bagi masyarakat tapi dapat membiayai pendidikan anak-anak didesa tersebut, karena bertambahnya hasil pendapatan disetiap kepala keluarga.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebaagai bahan evaluasi guna dapat meningkatkan program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kwala Serapuh Kab.Langkat adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaksana Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) ataupun Walhi-Sumut agar dapat konsisten dan segera melakukan rancangan kerja yang telah ada, hingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi penerima manfaat pogram wilayah kelola rakyat di Desa kwala Serapuh.
2. Bagi penerima manfaat yaitu masyarakat Desa Kwala Serapuh agar dapat tetap semangat dalam memperjuangkan hak-hak atas hutan rakyat, hingga wilayah hutan tetap lestari, karena pada dasarnya jika hutan lestari maka masyarakat sejaheera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. Lincoln. 1999. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress.
- Anto. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Asriyah. Wardatul. 2007. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Skripsi*. Yogyakarta: Fd UINSU Kalijaga
- Berry. David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Data. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara.
- Haroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Narwojo, J. Dwi dan Suryanto. Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Notoatmodjo. Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pigou, A.C M.A. 1960. *The Economic Of Welfare*. London Mac Milan & CO LTD.
- Pujileksono. Sugeng. 2016. *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Ridwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai. Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Priananta, Oky. 2008. *Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Hutan Oleh Penduduk Desa Gasengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. skripsi*. Semarang: FIS UNES
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, Nora. 2012. *Sosiologi Pedesaan*. Padang

Syamsir dan Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Wasistiono, Sadu Dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media.

Sumber lain :

(<http://dadangjoko.blogspot.com/2014/05/permasalahan-yang-dihadapi-dalam.html> diakses pada 29 maret 2021 pukul 5.18 wib)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi



**Gambar 1.1 : Dokumentasi Wawancara dengan Direktur-Walhi Sumut dan Masyarakat di Desa Kwala Serapuh**



**Gambar 1.2 Dokumentasi Observasi Lapangan di Desa Kwala Serapuh**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan *Kesejahteraan Sosial*  
FISIP UMSU  
di  
Medan, *09 Februari* 20*21*.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *FARADIBA TARIGAN*  
N P M : *1703090016*  
Jurusan : *Kesejahteraan Sosial*  
Tabungan sks : *127* sks, IP Kumulatif *3.47*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Peran program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Serapuh, Kab Langkat</i>	<i>REC</i> <i>[Signature]</i>
2	<i>Peran aparat desa dalam pengembangan objek Wisata air terjun penunjang di Desa Lee Bersih Kecamatan perancangan Rota subcussam</i>	<i>X</i>
3	<i>Peran Dinas sosial kota subulussalam dalam menangani korban banjir kec. Sultan Daulat Kota subulussalam</i>	<i>X</i>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

*PB : MUDAHIDIN.*

Pemohon,

Medan, tgl. *09 Februari* 20*21*.

*034.*

*[Signature]*

(*... FARADIBA TARIGAN*)

*[Signature]*  
*H. Mudahidin, S.Sos, M.P.*

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



**UMSU**  
Unggul | Cerdasi | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 151/KEP/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **09 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FARADIIBA TARIGAN**  
N P M : 1703090016  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT (WKR) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KUALA SERAPUH, KAB LANGKAT**  
Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 034.17.0309 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 09 Februari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 28 Djumadil Akhir 1442 H  
10 Februari 2021 M

Dekan



**Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



**UMSU**  
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 05. APRIL ..... 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FARADIBA TARIGAN  
N P M : 1703090016  
Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 151.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 09. FEBRUARI... 2021... dengan judul sebagai berikut :

"peran wilayah Kelola Rakyat Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat Di Desa Kuala Serapak Kab. Langkat"

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

*H. Mujawiddin S. G. Ng.*

Pemohon,

*FARADIBA TARIGAN*  
(... FARADIBA TARIGAN ...)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 508/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Kesjahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Jumat, 09 April 2021  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ANDINI WARDATUL JANNAH	1703090022	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERAN PANTI ASUHAN DALAM MENGEKANGKEMANDIRIAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTERI AISYIAH MEDAN
2	SYERA SYUCHAILI	1703090003	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESETARAAN GENDER DI DESA MANUNGAL KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG
3	KIKI ANDRIANI	1703090007	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DI DESA PASAR LEMBU KAB. ASAHAN
4	FARADIBA TARIGAN	1703090016	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT (MKRI) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KUALA SERAPUH KAB. LANGKAT
5					

Medan, 25 Sya'an 1442 H

07 April 2021 M

  
 De/Arifin Saleh, S.Sos., M.SP.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjabab surat ini agar disertai dengan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGUJIAN DAN PIMPINAN PIKAT MULA-AMADIKAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/SAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 13 Oktober .....2021.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : FARADIBA TARIGAN  
N P M : 1703090016  
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Alamat rumah : perumahan Setia Budi Raya  
Telp: 081807409519

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 1;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 1;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 1;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 1;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 1; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIBI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 2 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 1;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,

*FARADIBA TARIGAN*  
(... FARADIBA TARIGAN)

Disetujui oleh;

Medan, .....20.....

Medan, .....20.....

Dekan,

a.n.Rektor,  
Wakil Rektor - I

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)

(Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**SURAT PERNYATAAN**

*Bismillahirrohmanirrohiem*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : FARADIBA TARIGAN  
 Tempat, tgl. lahir : Kuala Berau, 18 Juli 1999  
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha\*  
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda\*  
 N P M : 1703090016  
 Alamat Rumah : Dusun Cahaya Baru, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam  
 .....Telp/HP. 081807404519  
 Pekerjaan/Instansi : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 .....Telp/HP. ....

melalui surat permohonan tertanggal ..... telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



*[Handwritten Signature]*

FARADIBA TARIGAN



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjangkau surat ini agar disebarkan secara luas dan tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGKUALIFIKASIAN SIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**BORANG DATA ALUMNI**



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	Faradiba Tarigan #P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Kuala Binjai, 18 Juli 1999
AGAMA	Islam
SUKU BANGSA	Karo
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2017
N P M	1703090016
JURUSAN	Kesejahteraan sosial
ASAL SEKOLAH	Sma Negeri 1 Simpang Kiri
ALAMAT SEKOLAH	Jln Abdurauuf. Kec Simpang Kiri kota subulussalam
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA .....ORANG, WANITA ..... ORANG = .....ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	Bahri Tarigan
NAMA IBU	sugarti
PEKERJAAN ORANG TUA	Pegawai Negeri Sipil
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Desa Loe Bersih Kec. penanggahan kota subulussalam
TELEPON/HP	
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 1196/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FARADIBA TARIGAN	1703090016	Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.Sos.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.Sos.	PERAN PROGRAM WILAYAH KELOLA RAKYAT (MKR) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KUALA SERAPUH, KAB. LANGKAT
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum  
Rektor

Tgl : 14/10/2021

Medan, 06 Rabiul Awwal 1443 H

13 Oktober 2021 M

Panitia Ujian

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.Sos.



Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

Sekretaris